

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh tiap daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya yang ada, belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan masih tingginya angka kemiskinan di desa yang menimbulkan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan daerah kota.

Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong Pemerintah untuk menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait akuntansi pemerintah desa. Hal ini membawa harapan baru bagi masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Pembangunan desa dalam hal sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan akuntansi pemerintah desa.

Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan

keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No 6 tahun 2014 prinsip didalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Akuntansi Pemerintahan tidak berbeda dengan Akuntansi Umum. Akuntansi secara rinci dapat dijelaskan melalui siklus akuntansi yaitu dimulai dari analisis transaksi, kemudia dicatat didalam jurnal, dilakukan *posting* ke buku besar, menyajikan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan.

Pencatatan siklus akuntansi dimulai dari jurnal. Jurnal merupakan suatu media/metode yang digunakan untuk mencatat transksi keuangan. Jurnal dibedakan menjadi dua, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Contoh jurnal khusus adalah jurnal penjualan, jurna; pembelian, jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.

Buku besar adalah sebuah buku berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account). Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang, dan ekuitas dana. Proses memasukkan rekening-

rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan *posting*. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing rekening yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara periodik (mingguan atau bulanan). Buku besar merupakan catatan akuntansi permanent yang terakhir, sehingga dikenal dengan *the books of final entry*.

Prosedur perjurnalan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi atau selama satu tahun. Prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening yang berisi akun dan saldo dengan mengambil angkanya dari saldo terakhir yang ada di setiap rekening di buku besar.

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun guna menghasilkan pengaitan yang tepat antara pendapatan dengan belanja/biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika terdapat transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran.

Prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Apabila tahap penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 (ayat 6) semua transaksi akuntansi yang dilakukan oleh desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan

desa yang merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa Anggaran, Buku kas, Buku pajak, Buku bank, Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), penerapan akuntansi desa diawali dari adanya APB Desa yang pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Selain itu, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Akuntansi pemerintah desa pada desa Kubang Jaya dimulai dari pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan

sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat.

Dalam struktur pemerintahan desa, satuan kerja perangkat desa (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja perangkat desa. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Bendahara desa yang merupakan bagian dari PTPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan pada akhir periode dari catatan tersebut bendahara menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Proses akuntansi yang diterapkan pada Desa Kubang Jaya dilakukan secara komputerisasi. Proses terjadinya transaksi akuntansi diawali dengan mencatat transaksi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dan pendapatan yang diperoleh dari transfer juga dilakukan pencatatan dalam Buku Bank Desa. Desa Kubang Jaya membuat pelaporan berupa laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa per bulan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

BKU terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, untuk menginformasikan identitas satuan kerja, identitas penggunaan anggaran, identitas bendahara pengeluaran, tanda tangan pengguna anggaran, dan tanda tangan bendahara

pengeluaran. Kedua, untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan transaksi lainnya yang mempengaruhi kas yang dikelola bendahara pengeluaran.

Permasalahan yang ditemukan pada Desa Kubang Jaya adalah tidak dilakukannya pencatatan jurnal penerimaan kas dan pengeluaran jurnal kas secara terpisah. Desa Kubang Jaya juga tidak melakukan pencatatan pada buku besar dan neraca saldo. Selain itu, Desa Kubang Jaya juga tidak mencantumkan saldo pada akun piutang dan persediaan tahun 2016-2017 dan aset tetap tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Kekayaan Milik Desa yang menunjukkan bahwa tahun 2016, saldo piutang dan persediaan bernilai 0 (Lampiran 2). Pencatatan saldo akhir tahun 2016 pada laporan kekayaan milik desa adalah menjadi saldo awal pada tahun 2017, namun tidak disajikan oleh Desa Kubang Jaya karena Desa Kubang Jaya juga tidak membuat Jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh dan untuk mengakui belanja/biaya pada periode dimana barang dan jasa yang berkaitan dipergunakan. Transaksi pengeluaran dan penerimaan yang mempengaruhi kas yang dicatat kedalam jurnal umum harian dan dibuat sebagai jurnal pendamping untuk transaksi-transaksi realisasi anggaran yang mempengaruhi akun-akun di neraca. Sehingga, permasalahan di Desa Kubang Jaya terjadi saat transaksi penerimaan atau pembelian atas aktiva Desa Kubang Jaya tidak dicatat kedalam jurnal.

Masalah lainnya yang ditemukan yaitu, Desa Kubang Jaya sudah membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Neraca). Aset tetap yang dimiliki Desa Kubang Jaya

adalah, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi. Tetapi aset tetap yang memiliki saldo hanya peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan instalasi. Sedangkan tanah, gedung dan bangunan bersaldo Rp. 0,- (Lampiran 2).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan proposal dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Kubang Jaya**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan akuntansi pada Pemerintah Desa Kubang Jaya berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum?”

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan dari penelitian ini adalah:**

“Untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kubang Jaya berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum“

##### **2. Manfaat dari penelitian ini adalah:**

- a) Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama mengenai permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pemerintah desa pada Desa Kubang Jaya.

b) Bagi Desa Kubang Jaya, memberikan informasi kepada usaha dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah pencatatan akuntansi dimasa yang akan datang.

c) Bagi Pembaca, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan masing-masing bagian menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.
- BAB IV** : Bab ini menjelaskan secara singkat gambaran singkat identitas Responden yang berisikan tingkat umur responden, jumlah pegawai.
- BAB V** : Bab ini Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB VI** : Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna.